

## DAFTAR PUSTAKA

- Azar, M., dan Suhartoyo. 2015. Aspek Hukum Kebijakan Geothermal di Indonesia. *Jurnal Law Reform*. Volume 11. Nomor 1. Hal 124.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2017. Hasil Survey Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional. [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/infografis\\_Hasil\\_Survey\\_MASTEL\\_tentang\\_Wabah\\_Hoax\\_Nasional.pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/infografis_Hasil_Survey_MASTEL_tentang_Wabah_Hoax_Nasional.pdf) diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 10.09 WIB.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. 2018. *Statistik Daerah Kabupaten Banyumas 2018*. <https://banyumaskab.bps.go.id>.
- Budiharjo, B., Nugroho dan Budihardi, M. 1997. Resource Characteristics of the Ungaran Field, Central Java, Indonesia, *Proceeding of National Seminar of Human Resources Indonesian Geologist*. Yogyakarta.
- Budiman, A. 2017. Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik. *Majalah Info Singkat Pemerintah Dalam Negeri*, Vol IX No. 01/I/Puslit/Januari/2017. [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-IX-1-I-P3DI-Januari-2017-181.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IX-1-I-P3DI-Januari-2017-181.pdf) diakses pada tanggal 15 Juni 2019 09.58 WIB.
- Bungin, B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiaologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Dinas Lingkungan Hidup. 23 Oktober 2018. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Perencanaan Tata Ruang*. <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs-dalam-perencanaan-tata-ruang-73> diakses pada tanggal 6 Januari 2019 pukul 15.36 WIB.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dyah, A. S., 1983. Persepsi Staf Pengajar dan Pimpinan Tiga Perguruan Tinggi tentang Pengabdian pada Masyarakat. *Tesis*. Bogor: Fakultas Pascasarjana IPB.
- Dye, T. R. 1981. *Understanding Public Policy*. Edisi Keempatbelas. United States: Pearson Education. Inc dalam Qiqi Asmara. 2009. Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sebagai Energi Alternatif. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fatem, S. M., San A. Awang, Satyawan Pudyatmoko, dkk. 2018. Camouflaging Economic Development Agendas with Forest Conservation Narratives: A Strategy of Lower Government for Gaining Authority in The Re-centralising Indonesia. *Land Use Policy*. [www.elsevier.com/locate/landusepol](http://www.elsevier.com/locate/landusepol).
- Gay, L.R. dan P.L. Diehl. 1992. *Research Methods for Bussiness and Management*. New York: MacMillan Publishing Company.

- Ginoga, K., Mega Lugina, dan Deden Djaenudin. 2005. Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Volume 2. Nomor 2. Hal 206.
- Hamdi, A. S. dan E. Bahrudin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Istijanto. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia: Cara Praktis Mengukur Stres, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja dan Aspek-Aspek Kerja Karyawan Lainnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjoroningrat. 1977. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Krott, Max. 2005. *Forest Policy Analysis*. Belanda: Springer.
- Latifah, M., dan Ema Gusmayanti. 2012. Optimalisasi Pemanfaatan Panas Bumi sebagai Sumber Energi Pembangkit Listrik untuk Mencapai Keamanan Energi, *The 2012 ASC Paper Competition Participants*.
- Nilawati. 2013. *Hubungan antara Persepsi dengan Sikap Orangtua Terhadap PAUD Khairunisa Seberang Padang Kecamatan Padang Selatan Kota Padang*, *Jurnal Spektrum PLS*. Vol. 1 No. 1.
- Mar'at. 1984. *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Muhdar, M., Mohamad Nasir, dan Rosdiana. 2015. *Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara*. Volume 1. Issue 3. Hal 430.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
- Putra, Ardi. 2013. Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lingga Terhadap Izin Pertambangan Bauksit Tahun 2011. *Skripsi*. Riau: Universitas Riau.
- Romsan, A. 2008. Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase, <http://eprints.unsri.ac.id/6970/> diakses pada tanggal 12 Juni 2019 pukul 17.44 WIB.
- Sadli, S.1976. Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang. *Tesis*. Program Pascasarjana. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Saptadji, Nenny. Tanpa Tahun. *Sekilas tentang Panas Bumi*. [http://geothermal.itb.ac.id/sites/default/files/public/Sekilas\\_tentang\\_Panas\\_Bumi.pdf](http://geothermal.itb.ac.id/sites/default/files/public/Sekilas_tentang_Panas_Bumi.pdf) diakses pada tanggal 28 September 2018 pada pukul 09.47 WIB.
- Setiawan, S. 2012. Energi Panas Bumi dalam Kerangka MP3EI: Analisis terhadap Prospek, Kendala, dan Dukungan Kebijakan, telah dipublikasikan sebelumnya dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Volume XX (1) Tahun 2012.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudarmadji. 2008. *Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup, dan Otonomi Daerah*. <http://lib.geo.ugm.ac.id/wordpress/?p=125> diakses pada tanggal 4 Januari 2019 pukul 02.26 WIB.
- Sudrajat, A. 2003. Persepsi Birokrasi Tentang Otonomi Bidang Kehutanan. *Disertasi*. Bogor: Program Pascasarjana IPB.

- Tampubolon, B.I. 2015. Analisis Kebijakan Pemanfaatan Energi Panas Bumi sebagai Alternatif Pembangkit Listrik. *Tesis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Wahyungsih, R. 2005. Potensi dan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi di Indonesia. *Kolokium Panas Bumi*.